

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membayar pajak bagi masyarakat awam yang belum begitu memahami fungsi dari pajak itu sendiri seolah akan menjadi beban bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu fenomena umum pada dasarnya masyarakat selama ini cenderung memandang pajak hanya sebagai kewajiban dan beban semata. Menurut (Tarjo dan Indra, 2005) dimana Wajib Pajak mendapat beban yang sangat berat, karena: (1) Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, (2) Menghitung Dasar Pengenaan Pajaknya (DPP), (3) Mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang maksudnya mengurangi pajak yang terutang dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan, dan (4) Melunasi pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang.

Senada dengan (Dewi, 2011). Sampai sekarang masih banyak warga masyarakat yang beranggapan bahwa pajak merupakan pungutan bersifat paksaan yang merupakan hak istimewa pemerintah dengan tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada pembayar pajak. Adanya kondisi seperti ini tidak mendukung upaya menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak yang patuh membayar pajak, tetapi akan menjadikan adanya kecenderungan untuk berusaha menghindari dari kewajiban pajak.

Menurut mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang pernah menjabat (2004-2009) saat berada di Wisma Kalla Rabu 28 Maret 2012, dalam situs berita online (www.fajar.co.id, 2012). Jusuf Kalla meminta pengusaha atau perorangan jangan memandang pajak sebagai beban. Tapi pajak itu adalah sirkulasi perekonomian yang akan dikembalikan ke rakyat. Karena itu jangan ditunda atau diakali baik oleh Wajib Pajak apalagi petugas pajak. "Kalau pembayaran pajaknya lancar pemerintah bisa membangun jalan. Kalau jalan bagus, perekonomian bisa lancar. Jadi kembali juga kepada rakyat." Dari situlah seharusnya wajib pajak tidak boleh memandangnya sebagai beban, karena disitu merupakan kepedulian kita terhadap sesama yang mendasarinya ketika kita membayar pajak.

Dari beberapa pendapat di atas, dimana pajak sebenarnya yang terbukti dan kontras terlihat di kabupaten Pamekasan bahwa hasil dari pajak benar-benar kembali kepada masyarakat dan dinikmati oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dari kualitas dan fasilitas pendidikan yang terangkat, diantaranya:

1. Fasilitas di lembaga pendidikan atau di sekolah maupun perpustakaan umum semakin lengkap, dan sekolah-sekolah diantaranya sudah berstandar SBI. (www.banjarmasinpost.co.id)
2. Mampu menghasilkan murid-murid terdidiknya yang berprestasi di berbagai kompetisi luar daerah bahkan internasional dan menyabet berbagai penghargaan dengan membawa nama baik Pamekasan sebagai kabupaten pendidikan. (www.surabayapost.co.id)

3. Penghapusan buta Aksara di kabupaten Pamekasan semakin nyata dengan semakin mengecilnya angka buta aksara di kabupaten pamekasan bila dibandingkan dengan jumlah buta aksara di kabupaten lain di madura. (www.rri.co.id)
4. Pamekasan yang dinobatkan sebagai penyandang nama kabupaten pendidikan telah konsen untuk mengalokasikan APBDnya untuk sektor pendidikan melebihi apa yang ditetapkan pemerintah pusat yaitu melebihi 24%. (Profil APBD Kabupaten Pamekasan 2011)

Dengan meningkatnya fasilitas dan kualitas masyarakat melalui penunjangan dari sektor pendidikan yang kini dinikmati oleh masyarakat tersebut, itu artinya mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah yang memprioritaskan alokasi pendidikan dari APBDnya benar-benar dinikmati oleh masyarakat. APBD yang didalamnya terdapat unsur penerimaan dari sektor pajak tersebut konsen untuk sektor pendidikan guna meningkatkan kualitas masyarakat. Berarti secara teori yang dikemukakan beberapa pendapat bahwa pajak yang merupakan suatu kewajiban yang bersifat beban semata itu dapat ditepis, karena dibuktikan dari kewajiban membayar pajak tersebut hasilnya akan kembali ke masyarakat juga.

Untuk membuktikan dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut pajak tidak lagi dianggap sebagai beban semata, maka dari penelitian ini dipilih faktor-faktor persepsi, pengetahuan, karakteristik, dan *reward & punishment*, digunakan faktor-faktor tersebut karena lebih mudah untuk mencari tahu seperti apakah motivasi patuhnya wajib pajak

orang pribadi karena dengan mengetahui motivasi kepatuhannya dapat membuktikan wajib pajak orang pribadi tersebut apakah masih menganggap pajak sebagai beban atau tidak dalam membayarkan pajaknya.

Penelitian ini sebelumnya pernah dilakukan oleh (Supriyati dan Hidayati, 2008), namun penelitian tersebut mengulas wajib pajak badan yang diteliti perilakunya dari segi ataupun indikator pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap pajak, dan persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh dengan variabel terikatnya kepatuhan wajib pajak. Penelitian terdahulu juga pernah dilakukan oleh (Dewi, 2011), variabelnya adalah motivasi yang berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak atas pengenaan penghasilan, dan hasilnya berpengaruh positif dan signifikan. Namun dalam penelitian tersebut motivasi sebagai variabel independen hanya melihatnya dari dimensi persepsi saja.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui persepsi, pengetahuan, karakteristik, dan *reward & punishment*. Keempat variabel independen tersebut penggabungan dari empat penelitian terdahulu yang pernah mengulas penelitian terkait faktor-faktor yang dapat memotivasi seseorang untuk suatu tujuan tertentu, namun diluar ranah pajak yang kemudian peneliti kaitkan penelitian tentang faktor-faktor terkait motivasi tersebut ke ranah pajak.

Penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang signifikan dapat memotivasi seseorang tersebut kemudian peneliti masukkan ke ranah pajak untuk diteliti yaitu penelitian yang dilakukan (Kristiandi, 2009) tentang variabel persepsi yang berpengaruh terhadap motivasi belajar bahasa mandarin, (Rachmawati dan Turniani, 2005) tentang variabel pengetahuan terhadap motivasi penderita TB untuk sembuh. Variabel karakteristik wajib pajak adalah budaya organisasi dan sosial ekonomi, dimana dalam penelitian (Ocktaviana, 2011) budaya organisasi terhadap motivasi kerja karyawan, dan (Umami, 2007) sosial ekonomi orang tua terhadap motivasi belajar siswa. Variabel *reward & punishment* dalam penelitian (Masruroh, 2007) tentang pengaruh metode *reward & punishment* terhadap peningkatan motivasi belajar qur'an.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor persepsi, pengetahuan, karakteristik, dan reward & punishment berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar pajak di Pamekasan?
2. Apakah faktor-faktor persepsi, pengetahuan, karakteristik, dan reward & punishment berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar pajak di Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor persepsi, pengetahuan, karakteristik, dan *reward & punishment* secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar pajak di Pamekasan.
2. Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor persepsi, pengetahuan, karakteristik, dan *reward & punishment* secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar pajak di Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki serta menambah wawasan tentang faktor-faktor persepsi, pengetahuan, karakteristik, dan *reward & punishment* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu sebagai informasi dan referensi, bagi akademisi yang melakukan penelitian untuk mengkaji lebih lanjut tentang pengaruh faktor-faktor persepsi, pengetahuan, karakteristik, dan *reward & punishment* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Bagi Praktisi

Memberikan wacana informasi penting bagi KPP Pratama Pamekasan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak agar tidak lagi pajak dianggap sebagai beban. Agar pajak dapat tidak lagi dianggap sebagai

beban yaitu dengan meningkatkan faktor-faktor persepsi, pengetahuan, karakteristik, dan *reward & punishment* agar wajib pajak menjadi sadar dan lebih bertanggung jawab sebagai warga negara.